

# **KEBERAGAMAN DAN EKSKLUSI SOSIAL: SIMBOL IDENTITAS DALAM RUANG PUBLIK**

---

Lugina Setyawati, PhD<sup>1</sup>

## *Abstract*

*This article is a writing based on a research on tolerance and diversity in Tangerang City. The objectives of this writing is to describe social relations between groups with different ethnic and religious backgrounds by unfolding and reflecting boundaries of identity built by these groups. This writing argues that decentralization as a context, in which tolerance, ethnic identity and democratization has worked as a new arena for repositioning and redefintion the relations between groups at local level. The State (in this particular is the Local Government) is actually play a role as an agent that reconstructs the relations between ethnic and religious groups; and some of their “policies” has created social exclusion in public spaces. As the research unfold, Tangerang’s City vision to build “akhlaqul karimah” society (a society with pious religious attitudes), has contibuted to the shaping of social relations of the groups with different ethnic and religious backgrounds that shares living spaces in Tangerang, as the local government tries to “color” the city identity by expressing certain religious symbols in open public spaces. The result is a form of social exclusion, experienced and felt by ethnic (and religious) groups, which are the minority in political, economical and socio-cultural arena in Tangerang City.*

*Keywords: social exclusion, Tangerang City vision, identity symbols in public spaces*

---

<sup>1</sup>Ketua Program Pasca Sarjana bidang Sosiologi, Fakultas Ilmu-ilmu Sosial, Universitas Indonesia (FISIP-UI). Email: luginasetyawati09@ui.ac.id

*”Bagi kami yang non-Muslim, Asmaul Husna yang dipasang sepanjang jalan kota Tangerang tidak menjadi masalah, mungkin [pemasangan di ruang publik] memang diperlukan oleh teman-teman kami yang Muslim agar mereka selalu diingatkan akan nilai-nilai baik yang disampaikan oleh agamanya...”*

Pernyataan tersebut disampaikan oleh salah seorang peserta Diskusi Kelompok (Focus Group Discussion-FGD) yang diselenggarakan oleh Lab*Sosio* dalam proses menghasilkan data (*gathering data*) di lapangan untuk penelitian mengenai toleransi dan keberagaman di Kota Tangerang. Diskusi kelompok tersebut melibatkan para tokoh dari berbagai organisasi dan himpunan keagamaan yang berada di Kota Tangerang. Pernyataan di atas merupakan tanggapan atas pertanyaan fasilitator mengenai opini para tokoh non Muslim mengenai kaligrafi *Asmaul Husna* yang terpampang di tiang-tiang sepanjang jalan utama Kota Tangerang oleh Pemerintah Daerah. Gambaran ini menjadi warna Kota Tangerang sejak dipromosikannya Visi 2010 Kota Tangerang yaitu membangun ”Kota Tangerang sebagai kota industri, perdagangan dan permukiman yang ramah lingkungan dalam masyarakat yang berakhlak mulia”.

Kata-kata yang ditulis miring dalam pernyataan di atas merupakan tekanan yang penulis berikan untuk menggambarkan relasi sosial antar kelompok-kelompok beragam latar belakang etnis dan agama, yang saat itu terlibat diskusi. Ungkapan '*kami*', '*mereka*' dan '*agamanya*' merupakan kata-kata yang memiliki makna signifikan dalam menguraikan dan merefleksikan *boundaries of identity* (batas-batas identitas) yang sedang dibangun oleh kelompok-kelompok yang saling berhubungan tersebut. Walaupun seolah-olah ucapan tersebut mengandung penerimaan kelompok non Muslim atas dominasi simbol-simbol ke-Islaman dalam ranah publik, pernyataan tersebut sekaligus mengekspresikan dan menegaskan perbedaan antar kelompok-kelompok tersebut.

Tulisan ini bermaksud membahas praktik eksklusi sosial melalui ekspresi simbol identitas kelompok dalam ruang publik. Dalam konteks ini, tulisan ini memosisikan negara sebagai agensi yang berperan baik secara horizontal maupun vertikal dalam merekonstruksi relasi antar kelompok-kelompok etnik (dan agama) di tingkat lokal pasca reformasi. Desentralisasi sebagai konteks di mana wacana

toleransi, identitas etnisitas, dan demokratisasi bekerja telah menjadi arena baru bagi reposisi dan redefinisi relasi-relasi etnisitas di tingkat lokal.

Banyak tulisan, kajian dan hasil penelitian mengenai fenomena kebangkitan identitas lokal Indonesia pasca implementasi desentralisasi pada tahun 2001 (Davidson and Henley, 2007; Erb, Sulistyanto and Faucher, 2005; Aspinall and Fealy, 2003). Dengan menggunakan berbagai pendekatan, beragam fokus perhatian, pada intinya tulisan-tulisan tersebut menguraikan fenomena ini sebagai bagian dari proses membangun demokrasi di Indonesia pasca reformasi. Tulisan ini mencoba memperkaya pemahaman dan informasi mengenai fenomena tersebut dengan memfokuskan pada isu toleransi dan eksklusi sosial. Penulis memfokuskan pembahasan pada manifestasi dari fenomena tersebut yang mewujud dalam bentuk formalisasi nilai, simbol dan identitas etnis (dan agama) di Kota Tangerang melalui berbagai peraturan daerah, visi-misi daerah, dan pengaturan berbagai aktivitas masyarakat di ruang publik; dan implikasinya bagi eksklusi sosial yang dialami kelompok-kelompok yang tidak berposisi sebagai kelompok mayoritas dan dominan.

Pembahasan simbol identitas dan eksklusi sosial ini dibagi ke dalam empat sub pembahasan, yaitu “Etnisitas dan Eksklusi Sosial” yang menyampaikan konsepsi tentang etnisitas dan keterkaitannya dengan eksklusi sosial sebagai konsep dalam ilmu sosial. Selanjutnya, “Keberagaman Sosial di Kota Tangerang” mengantarkan konteks karakteristik masyarakat kota Tangerang yang heterogen baik dalam hal latar belakang etnisitas, agama, maupun kelas sosial-ekonomi. Pada bagian berikutnya, ulasan berfokus pada upaya Pemda Kota Tangerang untuk memberi warna identitas Tangerang yang berbasis religiositas melalui membangun visi ‘akhlaqul kharimah’. Rekonstruksi identitas ini telah berkontribusi terhadap relasi sosial ‘baru’ diantara kelompok-kelompok etnis (dan agama) yang berbagi ruang tinggal di Kota ini. Sedangkan bagian akhir akan menguraikan berbagai bentuk eksklusi sosial yang terjadi dan dialami oleh kelompok etnis (dan agama) yang tidak menduduki posisi dominan baik dalam arena politik, ekonomi, maupun sosio-kultural.

## Etnisitas dan Eksklusi Sosial

Etnisitas merupakan wacana yang digunakan untuk membahas ikatan-ikatan kolektif yang didasarkan atas atribut-atribut kultural, agama, ras, dan kesamaan sejarah (Gurr and Haff, 2004). Sebagaimana didefinisikan oleh Eriksen (1993), etnisitas merujuk pada hubungan antar kelompok-kelompok yang anggotanya mendefinisikan diri mereka berbeda dengan kelompok lain. Definisi tersebut menggarisbawahi pembahasan etnisitas yang selalu dikaitkan dengan klasifikasi individu berdasarkan kelompok, dan hubungan antar kelompok-kelompok sosial. Oleh karenanya, melalui konsepsi tentang etnisitas, batas-batas, simbol, dan atribut kolektif dibangun. Dalam konteks ini, etnisitas merupakan 'penanda' bagi keanggotaan kolektif, yang secara sistematis membedakan antara 'kami' dan 'mereka', antara 'insider' dan 'outsider' (Yuval-Davis, 1999; Eriksen, 1993). Dan, sebagaimana realitas sosial lainnya, simbol, batas-batas, dan atribut etnisitas sebagai identitas etnik merupakan hasil konstruksi yang dinamis dan berlangsung sepanjang waktu (Miron, 1999). Hal ini dikuatkan oleh pernyataan Barth (1969) yang menekankan bahwa batas-batas etnis memiliki dua ciri: pertama, bahwa batas-batas tersebut secara terus-menerus dibentuk. Proses tersebut merupakan sosial proses yang dapat berupa eksklusi maupun inkorporasi melalui mana kategori kolektif dipertahankan dan direproduksi. Kedua, melalui batas-batas yang menandai keanggotaan kelompok 'kami' dan 'mereka' tersebut, relasi sosial antar kelompok dipelihara.

Inter-relasi antara etnisitas dan eksklusi sosial merupakan konsekuensi dari konsepsi etnisitas yang asosiatif dengan pembahasan mengenai 'kami' dan 'mereka' dimana demarkasi atau batas-batas kelompok dibangun. Melalui atribut dan simbol yang menjadi identitas dan 'penanda' bagi kelompok, maka proses mengeksklusi dan mensubordinasi 'mereka' yang bukan anggota 'kami' berlangsung, sebagaimana dinyatakan oleh Yuval-Davis (1999:112) sebagai berikut:

*Racist discourse is defined as involving the use of ethnic categorizations (which might be constructed around biological, cultural, religious, linguistic or territorially based boundaries) as signifiers of a fixed, deterministic geneological difference of "the Other". This "Otherness" serves as basis for legitimizing exclusion and/or exploitation of members of the collectivity thus labelled*

Yuval-Davis (1999) mengkaitkan antara etnisitas dan '*politics of collective boundaries*' yang melibatkan proses kontestasi dan negosiasi. '*Politics of collective boundaries*' ditujukan sebagai upaya mempromosikan dan melanggengkan posisi kelompok untuk mengakses kekuasaan (negara dan *civil society*). Dalam kaitan dengan upaya '*politics of collective boundaries*' tersebut, maka etnisitas dapat didefinisikan sebagai proses politik yang mengkonstruksikan kelompok dan kepentingannya sebagai hasil dari upaya kelompok memposisikan diri terhadap kelompok lainnya. Proses politik etnik ini melibatkan kepentingan dan kekuasaan yang dimainkan melalui mobilisasi berbagai sumber daya yang relevan untuk mempromosikan konstruksi identitas kelompok. Seluruh sumber daya politik, ekonomi, dan kultural (termasuk bahasa, kebiasaan, agama dan lain-lain) digunakan untuk mereproduksi batas-batas identitas kelompok tersebut.

Berbagai literatur mengenai etnisitas mengenal tiga pendekatan yang biasanya digunakan untuk menganalisis etnisitas bekerja dan dimaknai dalam relasi antar kelompok. Pendekatan primordialisme menekankan pada identitas etnik dan agama yang dipandang memiliki dasar historis, genetis dan sosial yang mendalam sehingga secara signifikan membangun loyalitas dan komitmen anggotanya (Harff and Gurr, 2004). Aspek-aspek tersebut sangat potensial untuk dimobilisasi dalam '*politics of collective boundaries*', dan potensial untuk menciptakan konflik antar kelompok etnik (Bertrand, 2004). Sedangkan pendekatan instrumental memanfaatkan identitas etnis untuk memobilisasi kelompok dalam upaya mencapai tujuan-tujuan politik dan material -misalnya memobilisasi etnisitas untuk penguasaan sumber daya politik dan ekonomi (Harff and Gurr, 2004). Dalam hal ini, elite acap berperan dalam memanfaatkan ikatan emosional berbasis etnis untuk kepentingan penguasaan sumber daya politik dan kekuasaan negara dan ekonomi, sehingga potensial mengeksklusi kelompok lain (Bertrand, 2004). Sementara, pendekatan konstruktivis memfokuskan perhatian pada berbagai cara melalui mana identitas kelompok dikonstruksikan (Harff and Gurr, 2004). Walaupun berbeda, ketiga pendekatan tersebut tidak perlu dilihat sebagai pendekatan yang terpisah, tetapi dapat berlangsung secara bersama-sama dalam proses mobilisasi etnis.

Pada prinsipnya, tindakan dan relasi sosial yang berbasis identitas etnik dibentuk dan berlangsung dalam konteks politik di mana kelompok-kelompok etnik tersebut berada. Harff dan Gurr (2004)

menyebut lingkungan politik (*political environment*) sebagai salah satu faktor yang berkontribusi terhadap relasi antar kelompok etnik. *Political environment* ini merujuk pada empat (4) tipe rejim yang berkuasa: demokrasi, otokrasi, sosialis, atau populis. Karakter rejim yang demokratis akan mendorong relasi kelompok etnik yang lebih terbuka, akomodatif dan menjunjung kesetaraan. Karena itu, walaupun konflik berlangsung maka konflik tersebut cenderung bersifat '*non violent*'. Sementara rejim yang non demokratis (otokratis dan sosialis) cenderung akan mendorong relasi yang timpang, sehingga dapat memicu perlawanan dan konflik yang menggunakan kekerasan (Harff and Gurr, 2004).

Peran negara juga dibahas oleh Bertrand (2004) yang membahas relasi etnisitas berfokus pada konflik etnik. Menurutnya, identitas etnik potensial untuk dipolitisasi dan kelompok etnik potensial untuk dimobilisasi. Bertrand menekankan peran institusi-institusi politik dalam memposisikan kelompok-kelompok etnis, dan mengatur akses kelompok-kelompok tersebut terhadap sumber daya yang ada. Dalam konteks ini negara dapat melakukan eksklusi atau inklusi sosial terhadap kelompok-kelompok etnik yang ada melalui hak-hak politik yang diberikan (apakah semua kelompok memiliki hak yang sama dalam ranah politik, ekonomi, sosial dan kultural), representasi kelompok di dalam institusi negara, partisipasi dan keterlibatan dalam proses-proses kebijakan. Intinya, bagaimana hak-hak warga negara diakui tanpa melihat latar belakang etnisitasnya. Secara khusus, Bertran (2004) menunjukkan beberapa contoh praktik eksklusi yang dilakukan oleh negara, antara lain, pembatasan praktik keagamaan, penerapan atribut dan simbol-simbol religious-kultural, termasuk aturan berbusana (*dress code*). Bentuk dan derajat eksklusi yang dilakukan negara pada intinya bersifat dinamis dan tidak permanen (*fixed*). Perubahan yang berlangsung – pergantian rejim dan transformasi kelembagaan negara – memberi warna bagi dinamika relasi antar kelompok-kelompok etnik.

### **Keberagaman Sosial di Kota Tangerang**

Sejarah Kota Tangerang tidak dapat dilepaskan dari sejarah Kabupaten Tangerang, sebagai induk yang melahirkan kota ini, dan Propinsi Banten. Walaupun Propinsi Banten, dikenal sebagai wilayah yang mayoritas penduduknya berlatar belakang etnis Sunda, tidak otomatis menyebabkan Kota Tangerang dikenal sebagai wilayah tinggal

etnis Sunda. Keragaman kelompok etnik di Kota Tangerang merupakan bagian dari sejarah Kota ini.

Sensus penduduk tahun 1905 dan 1930 telah mencatat karakteristik pluralistik Kota Tangerang. Dikatakan dalam sensus tersebut bahwa penduduk kota ini terdiri etnis Sunda, Betawi, Cina, Arab, Jawa dan Eropa (<http://www.kotatangerang.go.id>). Keragaman ini menyebabkan sukar untuk menentukan kelompok etnis yang menjadi cikal bakal atau disebut sebagai masyarakat adat/asli Kota Tangerang<sup>2</sup>. Rupanya sejarah Tangerang adalah sejarah kaum pendatang. Kelompok etnis Sunda misalnya, menurut sejarahnya berawal dari penyerbuan orang Priangan ke Batavia, yang kemudian setelah peperangan berakhir memutuskan untuk tetap tinggal di Tangerang. Sampai sekarang mereka tetap mengidentifikasi identitasnya sebagai orang 'Sunda'<sup>3</sup>. Walaupun tetap menekankan perbedaan identitas ke-Sunda-an mereka dengan masyarakat etnis Sunda di Priangan. Ikatan sosial (*sense of belonging*) yang kuat terhadap Tangerang lebih kuat ketimbang Priangan. Bagi mereka komunitas etnis Sunda di Priangan merupakan "*others*" yang tidak lagi menjadi rujukan identitas ke-Sunda-an mereka. Bahasa yang relatif berbeda menjadi salah satu indikator yang mereka kemukakan dalam menyatakan konsepsi Ke-Sunda-an mereka yang khas Tangerang.

Selain warga etnis Sunda, etnis Betawi merupakan salah satu kelompok sosial yang jumlahnya relatif signifikan di kota Tangerang. Mereka tinggal di wilayah-wilayah perbatasan Tangerang dan Jakarta. Dikaitkan dengan kelompok etnis Betawi di Jakarta, mereka umumnya diklasifikasikan sebagai Betawi Ora. Etnis Tionghoa merupakan kelompok sosial kultural lain yang populasinya cukup tinggi di kota Tangerang. Walaupun data mengenai etnisitas tidak dicantumkan dalam Sensus Penduduk, tetapi berdasarkan catatan beberapa penulis yang kemudian diadopsi menjadi pengetahuan umum, populasi etnis Tionghoa di kota ini diperkirakan sekitar 30% dari total penduduk

---

<sup>2</sup>Walaupun dalam tulisannya Wahidin Halim (2005) menyebut penduduk asal Tangerang beretnis Sunda yang berasal dari Banten, Bogor dan Priangan; dan baru pada tahun 1526 masuk pendatang beretnis Jawa yang bermigrasi dari wilayah Kesultanan Demak dan Cirebon. Sedangkan penduduk yang berasal dari etnis Betawi bermukim di Tangerang sebagai proses perkembangan kota Batavia.

<sup>3</sup>Wawancara dengan tokoh masyarakat Sunda Tangerang (tinggal di Pasar Lama), 7 Desember 2008.

(Go,2008; hasil wawancara dengan pejabat walikota Kota Tangerang pada Desember 2008). Tidak ada yang mengetahui dengan pasti sejak kapan kelompok etnis Tionghoa datang dan menetap di Tangerang. Tetapi berdasarkan catatan sejarah, ketika pasukan Belanda tiba di pelabuhan Banten pada tahun 1596, mereka sudah menjumpai komunitas etnis Tionghoa yang hidup berdampingan dengan warga setempat (Halim, 200%). Bahkan di wilayah Banten yang menjadi perantara transaksi perdagangan antara pedagang asing dengan lokal adalah pedagang Tionghoa.

Keberadaan etnis Tionghoa di Tangerang yang sudah beratus-ratus tahun diindikasikan oleh keberadaan vihara tertua Boen Tek Bio yang diperkirakan berdiri sejak tahun 1684, dan vihara Boen San Bio pada tahun 1689. Keduanya merupakan bangunan tertua di wilayah Kota Tangerang saat ini yang terus dipelihara dan menjadi objek wisata kota ini (Halim, 2005). Bahkan, wilayah pecinan di kawasan Pasar Lama merupakan cikal bakal dari Kota Tangerang. Etnis Tionghoa yang berasal dari dan bermukim sudah ratusan tahun di Tangerang mempunyai sebutan sendiri yaitu 'Cina Benteng'. Nama yang lahir diasosiasikan dengan keberadaan Benteng Makasar di wilayah Tangerang pada masa kolonial. Stereotipi umum di Indonesia mengenai etnis Tionghoa yang menganggap status ekonomi mereka lebih baik daripada warga non Tionghoa tidak berlaku di kalangan etnis Cina Benteng. Cukup signifikan jumlah warga Cina Benteng yang hidup dalam kondisi pas-pasan dan bahkan miskin. Di berbagai bagian Kota Tangerang tempat warga Cina Benteng terkonsentrasi seperti Neglasari, Sewan, Tigaraksa, Kampung Melayu, mereka mengandalkan hidup dari aktivitas bertani, peternak atau nelayan (Go, 2008; Halim, 2005). Ketiga kelompok etnik tersebut, Cina Benteng, Sunda dan Betawi diakui mayoritas warga Kota Tangerang sebagai 'orang lama' Tangerang (jika tidak bisa disebut sebagai penduduk asli).

Ciri masyarakat plural di Tangerang diperlihatkan oleh pola tempat tinggal kelompok etnik yang cenderung berkelompok (*cluster*). Kelompok etnik Sunda sebagian besar menempati daerah Tangerang Selatan dan Tangerang Tengah, antara lain di Cikupa, Serpong, Curug, Tigaraksa, dan Legok. Sedangkan masyarakat etnis Betawi tinggal di wilayah kecamatan Teluk Naga, Batucapeper, Ciputat, dan Ciledug dan mereka umumnya bekerja sebagai petani. Sementara wilayah pemukiman Cina terdapat di wilayah tengah Kota Tangerang (antara lain di Pasar Lama), Neglasari, Batucapeper, dan Tigaraksa. Meskipun

konsentrasi tempat tinggal berbasis etnisitas dapat diidentifikasi, tetapi kehidupan berdampingan yang sudah berlangsung ratusan tahun telah memberi karakteristik, relasi sosial yang khas di antara ketiga kelompok etnis yang dikategorikan sebagai 'orang lama' tersebut. Dalam penelitiannya, di daerah Dadap, Go Gien Tjwan (2008) pada akhir tahun 1950-an menggambarkan relasi yang relatif harmonis antar kelompok etnis yang ada, antara lain melalui perkawinan antara warga Cina Benteng dan Betawi atau Sunda merupakan hal yang biasa<sup>4</sup>. Berdasarkan pengamatannya, Go Gien Tjwan menggambarkan situasi desa Dadap di Tangerang sebagai berikut:

Tanda paling khas yang merupakan simbol keserasian hubungan antara golongan asli dan peranakan di Dadap ialah pemandangan sekelompok petani yang sedang dalam perjalanan pulang dari sawah. Menyandang pacul di bahu, bertopi pandan dekil... Mereka semua berjalan berdampingan dengan akrab dan kemudian duduk dengan santai di bangku kayu milik penjaja makanan dan minuman di satu-satunya jalan desa... (2005:218).

Demikian pula berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara yang penulis lakukan, beberapa warga Cina Benteng menyebut kerabat yang menikah dengan warga Betawi atau Sunda.

Dalam perkembangannya, etnis Tionghoa di Tangerang menjadi sangat beragam bersamaan dengan berkembangnya Tangerang menjadi pusat industri dan penyangga ekonomi DKI Jakarta. Warga etnik Tionghoa pendatang dari Bagan Siapi-api, Kalimantan, Semarang, Surabaya, dan daerah lainnya di Indonesia datang dan menetap di kota ini. Sebagian besar pendatang tinggal dan hidup di wilayah-wilayah pemukiman baru seperti di Lippo Village, Bumi Serpong Damai, Summarecon Gading Serpong dan Alam Sutra. Hal ini menjelaskan kenyataan bahwa etnis Tionghoa bukanlah entitas yang tunggal.

---

<sup>4</sup>Penelitian Go tersebut memberikan gambaran mengenai situasi relasi etnisitas antara warga Tionghoa dan pribumi di Tangerang pada masa sebelum pemerintahan Orde Baru berkuasa. Beberapa informan Tionghoa menyampaikan bahwa kedudukan dan posisi sosial mereka sebagai warga non pribumi relatif berubah sepanjang periode Orde Baru, terutama status kependudukan mereka menjadi marginal, dan pada periode tersebut, mereka harus melepaskan dan tidak mencantumkan kepercayaan Kong Hu Cu sebagai bagian identitas dalam KTP.

Selain dalam hal etnisitas, keberagaman di kota Tangerang juga berlaku dalam konteks kehidupan beragama. Kondisi ini terutama tampak setelah Kota Tangerang menjadi pusat industri yang menjadi daya tarik para pencari kerja. Jumlah pendatang yang cukup tinggi menyumbang pada keragaman kelompok umat beragama di wilayah ini. Meskipun demikian, Islam tetap merupakan agama yang dianut oleh mayoritas penduduk. Dominasi Islam sebagai kelompok mayoritas terutama terasa pasca reformasi. Dalam konteks upaya membangun identitas ke-Tangerang-an, konsepsi Islam tentang masyarakat yang berakhlak mulia menjadi dasar filosofis membangun masyarakat Tangerang, yang disebut dengan “*akhlaqul karimah*”<sup>5</sup>.

### **Desentralisasi dan Wacana Keberagaman: Meredefinisi Posisi dan Relasi Sosial di Kota Tangerang**

Kota Tangerang sebagai *hinterland* ibu kota Jakarta merupakan kota industri yang sangat dinamis, ditandai oleh perkembangannya yang pesat dalam bidang ekonomi dan politik. Kota ini memiliki julukan sebagai kota ‘sejuta pabrik’ mencerminkan karakteristik ekonomi kota yang bertumpu pada bidang industri. Ciri sebagai kota industri berkontribusi pula dalam memberi warna bagi heterogenitas kota Tangerang dalam hal etnisitas, religiositas, dan kelas sosial-ekonomi penduduknya. Keberagaman tersebut antara lain dikontribusi oleh arus migrasi yang secara cukup signifikan menyumbang pada pertumbuhan penduduk kota Tangerang selama kurun waktu 5 tahun terakhir.<sup>6</sup> Arus migrasi ini kian marak setelah Kota Tangerang, pada tahun 2001 ditetapkan statusnya menjadi Kota, menyusul dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 tahun 1993 di mana sejak 27 Februari 1993

---

<sup>5</sup>Dalam penjelasan Visi Tangerang, masyarakat yang ‘berakhlak mulia’ (*akhlaqul kharimah*) dijabarkan sebagai “cerminkan melalui kualitas hubungan antara manusia dengan Tuhan dan hubungan antara manusia itu sendiri. Akhlak yang mulia menjadi landasan moral dan etika dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pemahaman dan pengamalan agama secara benar diharapkan dapat mendukung terwujudnya masyarakat Kota Tangerang yang religius, demokratis, mandiri, berkualitas sehat jasmani-rohani, serta tercukupi kebutuhan material-spiritual” (<http://www.kotatangerang.go.id>; Halim, 2005).

<sup>6</sup>Berdasarkan data statistic BPS, pada tahun 1999 populasi kota Tangerang berjumlah 1.267.547, sedangkan data tahun 2003 menunjukkan perubahan hingga jumlah mencapai 1.466.577.

melepaskan diri dari kabupaten induk Tangerang. Dalam usianya yang relatif muda, kota Tangerang masih dalam proses *'becoming'* (membangun citra dan identitasnya).

Sebagaimana wilayah di Indonesia lainnya yang menggunakan simbol dan nilai etnisitas (termasuk agama) dalam merekonstruksi ciri lokalnya, pasca implementasi kebijakan desentralisasi pada tahun 2001, Kota Tangerang membangun identitasnya dengan menggunakan basis nilai-nilai keIslaman. Hal ini terutama menonjol sejak kepemimpinan Wahidin Halim yang saat ini memasuki periode kedua, setelah terpilih kembali dengan kemenangan mutlak pada tahun 2008, karena memperoleh suara 85% dari total pemilih<sup>7</sup>. Nuansa Islam yang direpresentasi melalui konsepsi "*akhlaqul karimah*" oleh Pemda dimanifestasikan melalui ragam media dan aparatus negara. Selain melalui parade kaligrafi di sepanjang jalan kota, Perda No:7/2006 tentang 'Minuman keras' dan Perda No: 8/2006 mengenai Prostitusi' sering dijadikan indikator bagi citra keIslaman tersebut<sup>8</sup>. Melalui kedua peraturan tersebut, Pemda mengelola aktivitas masyarakat, terutama dunia hiburan. Khususnya, Perda No: 8/2006 sempat mengundang respon dari berbagai kalangan, terutama aktivis human rights dan perempuan, karena pemberlakuan jam malam bagi perempuan tanpa muhrimnya. Meskipun pada dua tahun belakangan, Perda tersebut tidak lagi gencar implementasinya. Merujuk pada diskusi mengenai eksklusi sosial yang dilakukan oleh negara - yang sudah dibahas pada bab "Etnisitas dan Eksklusi Sosial", fenomena penguatan nuansa Islam dalam publik di Kota Tangerang merupakan bentuk eksklusi sosial yang dilembagakan oleh Pemda sebagai *local state*. Dalam konteks ini, '*politics of collective boundaries*' dilakukan untuk mengkonstruksi batas-batas kelompok antara muslim ('kami') dan non-muslim ('mereka'). Sebagaimana diuraikan oleh Bertrand (2004), atribut dan simbol-simbol ke-Islaman yang mendominasi ruang publik di Kota

---

<sup>7</sup>Wahidin maju kembali dalam pilkada dan menang diusulkan oleh Golkar dan didukung oleh partai Islam lainnya yaitu PKS dan PPP (wawancara dengan tokoh masyarakat).

<sup>8</sup>Walaupun berdasarkan informasi di lapangan disampaikan bahwa dalam implementasi regulasi mengenai minuman keras, Pemda dipandang akomodatif terhadap konteks keragaman karakter kultural masyarakat, karena mengijinkan konsumsi minuman keras bagi kelompok etnis Tionghoa pada acara-acara perkawinan adat yang dilangsungkan di "rumah kawin" (tempat penyelenggaraan resepsi perkawinan bagi komunitas Cina Benteng).

Tangerang menjelaskan dominasi dan representasi kelompok umat Islam. Sementara, representasi dan keterlibatan kelompok non-muslim terbatas dalam level *local state*.

Dalam Visi Kota Tangerang secara jelas disebutkan bahwa identitas kota ini dibangun untuk mewujudkan masyarakat yang religius. Kata '*akhlaqul kharimah*' merupakan bahasa Arab yang jika diterjemahkan berarti 'akhlak yang mulia', sebuah makna yang seolah-olah tanpa asosiasi langsung dengan Islam. Persoalannya terletak pada penggunaan bahasa Arab yang asosiatif dengan Islam. Identitas kolektif, baik etnisitas maupun agama merupakan konstruksi sosial melalui mana setiap individu melihat dirinya sebagai bagian dari suatu kelompok, sekaligus memposisikan dirinya berbeda dengan orang lain dari kelompok yang berbeda (Fenton, 2001). Etnisitas dalam hal ini merupakan klasifikasi sosial yang muncul dalam konteks relasi sosial. Fenton (2001:6-7) – sebagaimana Bertrand (2004) – menyebutkan beberapa unsur etnisitas yang menyatu dalam kehidupan sosial kelompok, antara lain, kebiasaan/tradisi, budaya/adat, dan bahasa. Dengan demikian, '*akhlaqul kharimah*' merupakan artikulasi dari identitas Kota Tangerang yang didominasi oleh bahasa dan simbol kelompok tertentu, dalam hal ini Islam. Sebagaimana di sampaikan oleh peserta FGD yang non Muslim kepada penulis, "saya tidak tahu artinya *akhlaqul kharimah*, mungkin dalam Islam artinya baik...". Dalam hal ini, slogan '*akhlaqul kharimah*' yang selalu dipromosikan dalam mensosialisasikan Visi Kota Tangerang telah mereproduksi kesadaran kolektif kelompok Muslim dan non-Muslim yang selanjutnya mewarnai interaksi dan relasi sosial antar kelompok tersebut.<sup>9</sup>

Sebagai elemen dari budaya, simbol dan artikulasi etnisitas merupakan subjek perubahan dan merupakan bagian dari proses sosial. Pusat dari proses ini adalah produksi dan reproduksi batas-batas kolektif melalui bahasa sebagai emblem identitas kelompok (Fenton, 2001).

Selain formalisasi melalui Perda, praktik bernuansa ke-Islaman juga mewujud melalui aturan berbusana dan berbagai aktivitas yang berlangsung dalam ranah publik. Pada tiap hari Jumat pagi, sebagai

---

<sup>9</sup>Dalam tulisan ini, fokus pembahasan lebih pada relasi kelompok etnis Tionghoa (khususnya Cina Benteng) yang non Muslim dengan kelompok pribumi yang beragama Islam. Hal ini dikaitkan dengan posisi Cina Benteng yang relatif direkognisi sebagai "oran lama" yang dengan demikian, idealnya terlibat dalam proses rekonstruksi identitas Kota Tangerang.

ilustrasi, di lingkungan kantor Pemda berlaku konvensi yang berasal dari anjuran Walikota untuk mengenakan busana muslim (berbaju koko bagi pria dan berjilbab bagi karyawan wanita)<sup>10</sup>. Selain itu, tiap Jumat pagi diadakan ibadah bersama (ceramah), sebelum aktivitas kerja dimulai.<sup>11</sup> Ketentuan dan konvensi tersebut tentu saja tidak diberlakukan bagi mereka yang non Muslim, tetapi munculnya simbol-simbol identitas ini telah membangun kesadaran mengenai identitas kolektif di kalangan masyarakat Kota Tangerang. Batas-batas mengenai “kami” dan “mereka” menjadi jelas dan nyata dalam aktivitas di ruang publik yang formal. Menurut Parekh (2008), busana merupakan simbol identitas paling nyata dan kasat mata, sehingga dalam masyarakat multikultural, justru busana menjadi media kontestasi yang paling kuat untuk mengekspresikan identitas kolektif. Efektifnya busana dalam mengkonstruksikan wilayah “kami” dan “mereka” tercermin dalam pernyataan salah seorang staf Pemda yang non Muslim mengenai perasaannya:

...sebetulnya agak terganggu [dengan anjuran mengenakan busana muslim tiap hari Jumat di lingkungan kerja], jadi seperti tamu di kantor sendiri. Saya sudah bekerja 10 tahun lebih, semua teman baik, tidak ada yang berubah atau mengucilkan, tapi tetap ada rasa berbeda...

Ketidaknyamanan dengan diri sendiri merupakan indikator bagaimana pengaturan mengenai busana dalam lingkungan yang multikultural perlu dilakukan secara hati-hati (Parekh, 2008).

Upaya Walikota untuk membangun identitas Kota Tangerang yang bernuansa Islami tidak lepas dari dukungan legislatif yang mayoritas anggotanya beragama Islam walaupun afiliasi partai politiknya beragam. Berdasarkan data statistik 2007, gambaran mengenai agama anggota dewan dipaparkan dalam tabel di bawah ini:

---

<sup>10</sup>Munculnya simbol-simbol etnis dan agama mayoritas (dominan) melalui pengaturan berbusana dan aktivitas agama di ruang publik lainnya, terutama di lingkungan Pemda, sesungguhnya bukan eksklusif fenomena di Tangerang. Pasca implementasi kebijakan desentralisasi, gambaran yang relatif serupa banyak ditemukan di berbagai daerah. Di Serang, Banten, acara ibadah bersama di lingkungan Pemda juga terjadi. Demikian pula, di Pekanbaru, Perda Walikota No. 12 tahun 2001 menetapkan penggunaan busana (*dress code*) Melayu bagi siswa dan karyawan Pemda pada tiap hari Jumat.

<sup>11</sup>Wawancara staf Pemda (wanita), Desember 2008.

Tabel 3 Jumlah Anggota Fraksi di DPRD Kota Tangerang menurut Agama pada Tahun 2007

Fraksi	Islam	Katolik	Protestan	Lainnya	Jumlah
Partai Golongan Karya	7	-	1	-	8
PKS	8	-	-	-	8
Partai Demokrat	5	-	2	-	7
PPP	5	-	-	-	5
PDI Perjuangan	2	1	1	1	5
PAN	5	-	-	-	5
PKB	7	-	-	-	7
Jumlah	39	1	4	1	45

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Tangerang (dikutip dalam Kota Tangerang dalam Angka 2007)<sup>12</sup>

Figur di atas memperlihatkan mayoritas anggota Dewan beragama Islam, yaitu 39 orang dari total 45 anggota. Anggota yang beragama Protestan menduduki peringkat kedua dalam hal jumlah di badan ini. Meskipun demikian jumlah mereka relatif kecil, hanya diwakili oleh empat (4) orang anggota. Sedangkan agama Katolik dan lainnya hanya terwakili oleh masing-masing satu (1) orang. Jika dikaitkan dengan komposisi partai politik yang duduk pun jelas bahwa DPRD Kota Tangerang di dominasi oleh partai yang berbasis “Islam” (PKS, PPP, PAN, PKB).

Upaya Pemda Kota Tangerang untuk merekonstruksi identitas kota ini dengan basis nilai-nilai Islami telah melahirkan relasi sosial baru antar kelompok-kelompok etnik (dan agama) yang ada, terutama antara warga etnis Tionghoa dan pribumi serta antar warga Muslim dan non Muslim. Sebelum desentralisasi, relasi sosial berbasis etnisitas (dan agama) di beberapa bagian Kota Tangerang lama (antara lain di komunitas Kalipasir, Pasar Lama) relatif terbuka ditandai dengan kerukunan dan kohesi sosial masyarakat yang relatif baik. Tokoh masyarakat dan warga di Pasar Lama misalnya bercerita bahwa keragaman sudah menjadi realitas sosial komunitas tersebut. Bahkan seolah-olah menjadi memori kolektif komunitas yang terus dipelihara

<sup>12</sup>Komposisi anggota DPRD Kota Tangerang yang merujuk pada data statistik tahun 2007 dimaksudkan untuk menunjukkan korelasinya dengan berbagai Perda bernuansa Islami yang lahir sepanjang periode 2004-2009.

melalui berbagai cerita yang disampaikan kepada generasi muda oleh para sesepuh komunitas. Beberapa pemuda yang lahir dan besar di komunitas ini, dalam wawancara bercerita tentang pengalaman orang tua dan generasi mereka terdahulu tinggal bersama, berdampingan dan harmonis dengan warga yang berbeda-beda. Berdirinya Vihara Boen Tek Bio (vihara tertua yang berdiri sejak abad 17) dan Mesjid Kalipasir (yang juga berusia ratusan tahun) yang berhadapan di tengah pemukiman komunitas Pasar Lama, diakui warga sebagai simbol toleransi kehidupan keberagaman di daerah Kalipasir. Di wilayah ini akses pada ruang publik terbuka baik bagi warga Muslim, non Muslim, pribumi, Tionghoa (Cina Benteng) dan ragam kelas sosial ekonomi. Sebagai ilustrasi, warga Tionghoa terpilih menjadi Ketua RT/RW merupakan hal biasa di komunitas Kalipasir.<sup>13</sup>

Memori kolektif yang relatif sama juga dimiliki oleh sebagian warga Betawi yang pernah tinggal membaur dengan warga Tionghoa (Cina Benteng) di daerah Benda. Seorang aktivis perempuan asal Benda menyampaikan pengalaman masa kecilnya tentang keberagaman. Menurutnya, jika ada perhelatan di kalangan keluarga Tionghoa, biasanya para warga pribumi diundang di awal acara, sebelum hidangan yang mengandung 'babi' (yang dilarang dalam Islam) disajikan. Hal ini bentuk penghormatan dan toleransi terhadap warga Muslim yang memiliki ketentuan dan batasan dalam hal makanan. Walaupun menurutnya, jika keluarga Tionghoa tersebut membawakan penganan untuk dibawa pulang, penganan tersebut akan di kubur di halaman belakang rumah oleh ayahnya. Tetapi terbuka ruang bagi negosiasi dan kompromi dalam ranah publik oleh kelompok-kelompok yang berinteraksi.

Dalam wawancara mendalam, pengamatan dan FGD yang dilakukan dalam penelitian ini, sebagian besar tokoh dan warga masyarakat menyampaikan pandangannya mengenai berubahnya gambaran mengenai Tangerang saat ini, yang diindikasikan oleh hubungan antar kelompok berbeda agama dan etnik yang cenderung bersifat lebih segregatif. Tentu, desentralisasi bukan akar dan penyebab tunggal. Sebagaimana dibahas oleh Bertrand (2004), yang menggunakan analisis institusionalis kesejarahan, Indonesia merepresentasi *critical juncture* pada akhir tahun 1990an melalui mana

---

<sup>13</sup>Wawancara dengan Tokoh Masyarakat yang mengetahui sejarah mesjid dan vihara (Desember 2008).

transformasi institusional membuka ruang bagi negosiasi kembali unsur-unsur model nasional Indonesia melalui peran Islam dalam institusi politik, pentingnya hubungan pemerintah pusat-daerah, serta akses dan representasi kelompok-kelompok etnik dalam institusi negara. Periode tersebut terkait dengan berakhirnya rejim otoriter Soeharto yang menandai periode reformasi di mana berlangsung transformasi institusional dan memberi warna ke-Indonesia-an.<sup>14</sup> Dalam konteks Tangerang, reposisi relasi antar etnis Tionghoa (Cina Benteng) dan pribumi, terutama terjadi pasca reformasi. Sebagaimana diuraikan oleh salah seorang warga Kalipasir (Pasar Lama):

Kami tidak pernah mempersoalkan keberadaan warga kami ini Tionghoa atau bukan. Kami sudah tinggal bersama lama di sini [Kalipasir], *dari kita* masih anak-anak. Malah, waktu jaman ramainya Cina *diburu* Mei 1998, kami seluruh di RW sini bersatu bikin pos penjagaan untuk melindungi warga kami yang Tionghoa. Saya ingat bahkan kyai *kita* ikut jaga dan turun tangan... (wawancara dengan tokoh masyarakat di Pasar Lama, Desember 2008)

Identitas Tionghoa yang tidak dipersoalkan dalam komunitas Kalipasir merepresentasikan bentuk rekognisi atas keberagaman oleh kedua belah pihak baik kelompok pribumi dan Tionghoa. Tetapi posisi baru muncul, ketika pemaknaan identitas Tionghoa didominasi oleh rekonstruksi 'baru' muncul, membangun konsepsi tentang "kami" dan "mereka" yang berbeda antara warga Tionghoa dan pribumi di Kalipasir. Identitas Cina Benteng dalam konteks ini dimasukkan ke dalam kategori tunggal "Tionghoa", dan meredusir kenyataan Tionghoa sebagai entitas multi warna. Posisi sosial Cina Benteng dalam masyarakat Tangerang yang sebelumnya berbeda dengan warga etnis Tionghoa lain yang merupakan pendatang, dengan demikian memperoleh kedudukan baru.

---

<sup>14</sup>Bertrand melalui analisisnya tersebut menguraikan implikasi dari transformasi institusi dan model nasional Indonesia terhadap hubungan etnisitas yang pada akhir tahun 1990an banyak diwarnai oleh konflik dan ketegangan. Dalam tulisan ini, analisis tersebut penulis anggap relevan untuk menguraikan bagaimana rekognisi, negosiasi, dan kompromi antar kelompok-kelompok etnis (termasuk agama) berlangsung berkaitan dengan periode-periode kritis yang terjadi; dan bagaimana periode kritis tersebut menyumbang pada perjalanan dinamika relasi kelompok-kelompok dan pemaknaan tentang keberagaman.

### **Eksklusi Sosial dan Pengakuan: Bentuk dan Level Eksklusi**

Melalui studinya di Cameroon, Inack et.al. (1995) menguraikan tentang manifestasi solidaritas kelompok yang dapat berbentuk dua posisi yang saling bertolak belakang. Di satu sisi solidaritas kelompok dapat mendorong terbangunnya integrasi dan inklusi; di sisi lain, solidaritas kelompok juga dapat menyebabkan eksklusi sosial. Melalui solidaritas kelompok sentimen dan perasaan sebagai “kami” dibentuk. Meskipun demikian, solidaritas kelompok merupakan produk dari kelompok yang dibentuk melalui waktu dan berlangsung secara terus menerus. Perubahan yang berlangsung dalam lingkungan kelompok tersebut berperan dalam membangun dinamika solidaritas kelompok tersebut. Uraian pada bagian sebelumnya menjelaskan bagaimana dinamika solidaritas kelompok yang lintas etnis lahir dan berkembang di tengah keberagaman masyarakat Tangerang. Bersamaan dengan apa yang disebut Bertrand sebagai periode kritis terjadi rekonfigurasi solidaritas kelompok yang basisnya lebih bersifat primordial (agama dan etnisitas).

Eksklusi sosial berbasis etnisitas pada prinsipnya berkembang melalui ragam bentuk dan saluran. Eksklusi tersebut muncul sebagai akibat praktik-praktik dominasi dan monopolistik di ranah publik oleh kelompok dominan yang membangun solidaritas bersama untuk menguasai akses dan kontrol terhadap ruang publik (Inack et.al., 1995). Eksklusi sosial dapat didefinisikan sebagai berikut:

*Social exclusion is defined as a multi-dimensional process, in which various forms of exclusion are combined: participation in decision making and political process, access to employment and material resources, and integration into common cultural process. When combined, they create acute forms of exclusion that find a spatial manifestation in particular neighborhoods (Madanipour as cited in Byrne, 2005)*

Berdasarkan definisi tersebut, bentuk-bentuk eksklusi sosial yang terjadi di Kota Tangerang antara lain berkurangnya akses kelompok-kelompok minoritas terhadap wacana identitas Kota Tangerang yang sedang dipromosikan oleh Pemda.<sup>15</sup> Selain itu, beberapa komunitas etnis

---

<sup>15</sup>Eriksen (1969) mendefinisikan kelompok etnis minoritas sebagai “a group which is numerically inferior to the rest of population in a society, which is politically non-dominant and which is being reproduced as an ethnic

Tionghoa mengalami eksklusi karena hak-hak mereka untuk tinggal dan berpenghidupan di Kota Tangerang dibatasi karena adanya kepentingan-kepentingan Pemda. Kasus Bentrok yang terjadi antara warga tiga Rukun Warga (RW) di Kampung Lebak Wangi, Mekarsari, Kecamatan Neglasari, Tangerang dengan Satpol PP pada tanggal 13 April 2010 karena warga yang mayoritas etnis Tionghoa<sup>16</sup> akan digusur karena rencana penataan kota oleh Pemda.

Pada prinsipnya fungsi dan peran Pemda untuk mengakomodir kebutuhan dan aspirasi ragam kelompok etnik bisa dilakukan melalui berbagai cara, yaitu pengakuan (*recognition*), integrasi, dan representation kelompok-kelompok etnik yang beragam dalam institusi-institusi politik dan kekuasaan (Bertrand, 2004). Dalam konteks Kota Tangerang, tampaknya akomodasi yang diberikan oleh Pemda cenderung bersifat semata mengakui, tetapi belum membuka ruang lebih luas untuk representasi keragaman dalam berbagai institusi Pemda. Misalnya, dalam organisasi FKUB (Forum Komunikasi antar Umat Beragama) yang dibentuk oleh Pemda, keterwakilan seluruh kelompok agama belum terpenuhi. Konsep mayoritas dan minoritas masih digunakan untuk menetapkan komposisi anggota organisasi ini.

## Penutup

Etnisitas dan eksklusi sosial merupakan wacana yang relevan untuk dibahas dalam konteks Indonesia saat ini. Terutama, pasca implementasi kebijakan desentralisasi yang memberi ruang bagi berbagai ekspresi kultural dalam ruang publik. Fenomena kebangkitan identitas lokal mendominasi berbagai wilayah di Indonesia pasca penerapan desentralisasi termasuk di kota Tangerang.

Identitas berkaitan dengan jati diri dan karakter individual atau kelompok. Dalam proses rekonstruksi identitas lokal, berbagai aspek berperan mewarnai proses tersebut. Kota Tangerang memberikan penekanan pada nuansa ke-Islaman dalam membangun identitasnya. Peran elit melalui penetapan visi-misi Kota Tangerang yang menggarisbawahi pentingnya religiositas sebagai bagian dari

---

category". Meskipun ia menggarisbawahi bahwa konsep minoritas dan mayoritas bersifat relasional dan relatif.

<sup>16</sup>Penduduk wilayah tersebut sejak lama didominasi oleh etnis Tionghoa sebagaimana diuraikan oleh Go Gien Tjwan (2008) yang melakukan penelitian pada akhir tahun 1950-an.

identitasnya, dan penggunaan atribut dan simbol ke-Islaman untuk merepresentasikan aspek religiositas tersebut menunjukkan bagaimana politik etnik bekerja. Dalam proses ini, tidak terhindarkan munculnya dominasi dan kepentingan-kepentingan yang mewarnai “*politics of collective boundaries*”. Desentralisasi yang telah membawa perubahan di Kota Tangerang melalui transformasi kelembagaan telah mendorong terjadinya reposisi kelompok-kelompok etnis di kota ini dan rekonfigurasi relasi antar kelompok-kelompok tersebut.

Formalisasi simbol dan atribut ke-Islaman yang antara lain dilakukan melalui penggunaan bahasa di ranah publik dan aturan berbusana di lingkungan tempat kerja merupakan indikasi kontribusi negara (Pemda Kota Tangerang) dalam proses eksklusi sosial terhadap kelompok-kelompok minoritas. Walaupun, Pemda masih mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan ragam kelompok melalui pengakuan terhadap tuntutan etnis minoritas yang disampaikan melalui tokoh elite-nya (misalnya, diizinkan penggunaannya minuman keras secara terbatas untuk ritual adat di rumah kawin); tetapi tidak menghapuskan proses eksklusi yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari warga.

#### **Daftar Pustaka**

- Aspinall, Edward and Greg Fealy (eds). 2003. *Local Power and Politics in Indonesia, Decentralisation and Democratisation*. Singapore: ISEAS.
- Barth, Fredrik. 1969. *Ethnic Groups and Boundaries, The Social Organization of Culture Difference*. Boston: Little, Brown and Company.
- Bertrand, Jacques. 2004. *Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Byrne, David. 2005. *Social Exclusion* (2nd edition). New York: Open University Press.
- Davidson, Jamie S. and David Henley. 2007. *The Revival of Tradition in Indonesian Politics, The Deployment of Adat form Colonialism to Indigenism*. London & New York: Routledge.
- Eriksen, Thomas Hylland. 1993. *Ethnicity and Nationalism* (2nd edition). London, Virginia: Pluto Press.

- Fenton, Steve. 2001. *Ethnicity, Racism, Class, and Culture*. New York: Rowman & Littlefield Publisher Inc.
- Go, Gien Tjwan. 2008. *Desa Dadap, Wujud Bhineka Tunggal Ika*. Jakarta: Elkasa.
- Halim, Wahidin. 2005. *Ziarah Budaya Kota Tangerang, Menuju Masyarakat Berperadaban Akhlakul Karimah*. Jakarta: Pendulum.
- Harff, Barbara and Ted Robert Gurr. 2004. *Ethnic Conflict in World Politics* (2nd edition). Oxford: Wesview.
- Maribeth, Erb, Priyambudhi Sulistiyanto & Carole Faucher (Eds.), *Regionalism in post-Suharto Indonesia*. New York: Routledge Curzon.
- Miron, Louis F. 1999. "Postmodernism and the Politics of Racialized identities". In Rodolfo D. Torres et.al. *Race, Identity, and Citizenship, a Reader*. Oxford: Blackwell Publisher.
- Yuval-Davis, Nir. 1999. "Ethnicity, Gender Relations and Multiculturalism". In Rodolfo D. Torres et.al. *Race, Identity, and Citizenship, a Reader*. Oxford: Blackwell Publisher.